

Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi

Lisda Romdani¹

¹ Universitas Pendidikan Indonesia

Email korespondensi: lisdaromdani@upi.edu

Abstrack: *Social construction theory believes that an individual can interpret the world around him as a social reality through the process of his interactions in community groups. The purpose of this paper is to find out how citizens can interpret the implementation of regional head elections during a pandemic. This research was conducted using a literature study method (library research) or research with literature studies, namely the collection of data and information from scientific journals and books as well as research results. Thus the data process obtained shows that holding regional head elections in a pandemic holds a lot of meaning for citizens. The meaning depicted in digital media which becomes a public space so that citizens are used to realize their participation, and the manifestation of a citizen's democratic attitude can be seen from his role through the public space in his decision-making process. Thus, the media as a means of political discussion in the community, so that the meaning formed by each individual in the practice of citizenship will emerge.*

Keywords: *Social Construction Theory, Regional Head Election, Democracy.*

Abstrack: Teori konstruksi sosial mempercayai bahwa seorang individu dapat memaknai dunia sekitarnya sebagai realitas sosial melalui proses interaksinya dalam kelompok masyarakat. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana warga negara dapat memaknai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemic. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literature (library research) atau penelitian dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dari jurnal ilmiah dan buku serta hasil penelitian. Demikian proses data yang didapatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam pandemic menyimpan banyak makna bagi warga negara. Makna yang digambarkan pada media digital yang menjadi ruang public sehingga digunakan warga negara dalam mewujudkan partisipasinya, dan perwujudan sikap demokratis seorang warga negara dapat dilihat dari peran dirinya melalui ruang public dalam proses pengambilan keputusannya. Demikian, media sebagai sarana diskusi politik di kalangan masyarakat, sehingga akan muncul makna yang dibentuk setiap individu dalam praktek kewarganegaraan.

Kata Kunci: Teori Konstruksi Sosial, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Berkenaan dengan pembahasan teori yang akan dijadikan pijakan pada rencana penelitian, yaitu tentang teori konstruksi sosial yang memerlukan sejumlah konsep, pendekatan serta teori yang saling berhubungan. Sebagai acuan utama dalam membahas teori yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman tentang konstruksi sosial yaitu bagaimana memandang manusia sebagai individu yang dapat menciptakan realitas. Berdasarkan pemikiran Berger dan Luckman ini meyakini secara substantive bahwa realitas sosial merupakan hasil ciptaan manusia melalui kekuatan atau konstruksinya terhadap lingkungan sosial di sekelilingnya atau disebut dengan “reality is socieally contrusted”.

Dalam bukunya Berger dan Luckman yang berjudul “The Social Construction of Reality”, pemikiran tentang konstruksi sosial ini banyak terpengaruh oleh gurunya langsung yaitu Alfred Schutz sebagai pemikiran pendahulunya, yakni pemikiran fenomenologi. Edmun Husserl yang juga guru dari Alfred Schutz, merupakan pendiri aliran fenomenologi di Jerman, atas inilah pemikiran Berger dapat dikatakan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran fenomenologi. Teori konstruksi sosial berasal dari filsafat konstruksivisme yang di mulai dari gagasan konstruktif kognitif, hal ini terlihat dari gagasan para filsuf Socrates yang menemukan jiwa dalam setiap diri manusia, Plato menemukan akal dan budi dalam diri manusia, sehingga gagasan kongkret dari Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan dengan kebenarannya, oleh karena itulah pengetahuan bisa disebut fakta (Noname, 2018)

Asumsi dasar dari teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman dimana realitas merupakan hasil ciptaan manusia yang memiliki kemampuan kreatifitas melalui sudut pandangnya terhadap dunia sosial di lingkungannya. Kemudian, hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial yang dapat menghasilkan sebuah pemikiran, hal ini sehingga mengingatkan ucapan Aristoteles yaitu “*cogito ergo sum*” yang berarti “saya berfikir karena itu saya ada”. Dan ucapan Aristoteles tentang sebuah pemikiran menjadikan dasar kuat bagi perkembangan gagasan konstruksi yang dibangun oleh setiap manusia dalam kehidupan masyarakat yang dapat di konstruksi secara terus menerus. Asumsi dasar teori lainnya yaitu dapat membdekan realitas dengan pengetahuan (epistemologi). Realitas disini, diartikan sebagai kenyataan atau apa yang terjadi serta di akui keberadaannya, sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas itu ada dan memiliki karakteristik.

Teori ini berpijak pada sebuah paradigm konstruktivis yang melihat pada realitas sosial yang diciptakan oleh individu sebagai manusia bebas. Manusia memiliki kebebasan untuk bertidnak sebagai respon dari adanya stimulus yang diterima olehnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah individu penentu dalam dunia sosial yang dibentuk berdasarkan kehendaknya. Sehingga Berger dan Luckman memperkenalkannya dengan sudut pandang atau perspektif yang dapat melihat gejala sosial atau realitas sosial.

Proses konstruksi sosial yang dibangun oleh Berger dan Luckman berlangsung melalui interaksi dan dialektis dari 3 bentuk realitas diatas, berlangsung 3 bentuk realitas. Pertama, kegiatan objektivasi diartikan sebagai rutinitas tindakan dan tingkah laku individu secara umum sebagai fakta, maka Pfohl (2008) mengemukakan bahwa kenyataan sosial yang muncul merupakan konstruksi yang dibangun oleh manusia sesuai dengan sudut pandangnya. Kedua, symbol realitas dimana hal ini merupakan semua ekspresi dari apa yang didapatkan dari objektivasi, hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan individu kreatif yang dapat melakukan apapun termasuk mengkonstruksi realitas yang dipandangnya sebagai pengetahuan baik (Plucker, 1999). Ketiga, subjektiv realitas dimana konstruksi yang dimiliki individu merupakan dasar yang melibatkan diri sendiri sebagai proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial.

Seiring pemahaman tentang teori konstruksi sosial, Weber menilai perilaku manusia secara fundamental sebagai agen yang dapat mengontruksi dalam realitas sosial mereka. Hal ini menempatkan posisi peneliti akan setara dengan subjek yang diteliti dengan berusaha memahami dan ikut mengontruksikan sesuai yang menjadi permasalahan sosial yang ada. Proses konstruksi sosial selanjutnya terjadi secara dialektis antara diri sendiri dengan lingkungan sosial yang berlangsung dalam tiga momen, menurut Parera (2013) yaitu, berjalan meliputi kegiatan eksternalisasi sebagai penyesuaian diri dengan dunia lingkungan sosialnya “*Society is a hhuman product*”, objektivasi dimana interaksi sosial yang mengalami institusionalisasi “*Society is an objective reality*”, dan internalisasi dimana individu dapat mengidentifikasi diri di tengah sosial dan organisasi dimana individu tersebut menjadi anggotanya “*Man is a social product*”. Konsep ini bertujuan untuk menghubungkan antara subjektiv dan objektiv melalui dialektika.

Membahas dialektika, maka teori yang relevan dengan konstruksi sosial yaitu teori komunikasi dimana hal ini Craig (1999) mengemukakan paradigma teori konstruksi sosial dapat membawa aspek komunikasi yang meliputi ekspresi, interaksi, dan pengaruh. Berger (dalam Craig, 1999) menjelaskan bahwa komunikasi dapat dianggap sebagai interaksi yang mengekspresikan keadaan, dan melalui interaksi ini akan menimbulkan dampak pada kognitif, emosional, dan perilaku. Oleh karena itu, manusia harus mampu mendalami bagaimana proses kemampuan psikologis yang mengkonstruksi representasi sisi kognitif berupa mencari informasi dan membandingkan struktur yang ada dan menata ulang informasi tersebut.

Pusat perhatian teori konstruksi sosial adalah membangun sesuatu dan memiliki sesuai, sehingga peneliti yang menggunakan teori konstruksi sosial ini yaitu dapat mengkaji bagaimana orang-orang memiliki sesuatu seperti sudut pandang, pemikiran, emosional yang tidak memiliki bentuk fisik. Menurut Carey (2002) social construction dapat dibangun dengan empat tahapan, yaitu:

1. Konstruksi, dimana actor sosial dapat mengembangkan konsep bagaimana menjadi kenyataan.
2. Pemeliharaan atau maintenance dimana seseorang perlu aktif untuk memelihara konstruksi sosial agar terus berjalan.
3. Perbaikan atau repair dimana seseorang perlu memperbaiki konstruksi yang dapat berubah seiring berjalannya waktu.
4. Perubahan atau change dimana seseorang beberapa kali menkonstruksi dan perlu diketahui bahwa hal tersebut dapat berubah untuk generasi selanjutnya.

Diartikulasikan oleh Mato (1996) dalam teori konstruksi sosial ini dimana sebuah konstruksi atau penemuan seseorang dapat berwujud untuk menganalisis berbagai actor sosial. Sehingga pelaku sosial dapat mengambil bagian dari proses sosial itu sendiri dengan menghasilkan representasi dari peristiwa sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai teori konstruksi sosial bagaimana warga negara memaknai pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Pada penelitian ini juga berdasarkan (library research) atau penelitian dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dari jurnal ilmiah dan buku serta hasil penelitian. Dalam riset pustaka, menurut Zed (2004, hlm. 1) yaitu sebuah penelusuran atau penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh sebuah data dalam penelitiannya. Demikian, sebuah riset dengan metode studi pustaka membatasi kegiatannya pada bahan koleksi data dari kepustakaan saja tanpa memerlukan untuk penelitian riset lapangan.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teoritis ilmiah (bedah pustaka) dengan menggabungkan beberapa pandangan tentang Pilkada dan pandemic: bagaimana warga negara menyelamatkan demokrasi, yang kemudian hasil dari riset ini adalah menjelaskan bagaimana warga negara turut serta memaknai, dan membangun demokrasi di tengah-tengah pandemic yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah perdebatan tentang teori konstruksi sosial, berikut beberapa tanggapan ahli, maupun teori lain yang mendukung teori konstruksi sosial seperti Jesse Delia (akademisi Universitas Illinois) (1987) berpandangan bahwa teori konstruksi sosial ini dimana individu menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori yang konseptual sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Sehingga realitas sosial dapat hadir sesuai dengan individu tersebut melihat sesuatu sesuai sudut pandangnya sendiri. Kemudian teori ini diperkenalkan oleh Kelly bahwa konstruksi personal dapat memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaannya.

Kemudian teori Craig (1999) menganggap teori ini memberikan tradisi atau sudut pandang pada aspek komunikasi yang dibangun melalui ekspresi, interaksi, dan pengaruh. Sehingga tradisi ini menekankan pada perilaku, efek, dan persepsi seseorang. Demikian teori yang mendukung selanjutnya yaitu, dari teori konstruksionis (Anthur C Graesser, 1994; Karman, 2015) dimana teori ini dikembangkan sebagai disiplin psikologi kognitif dimana manusia dapat memahami informasi, wacana yang dimasukkan ke dalam pikirannya.

Selain dukungan, ada beberapa ahli yang mengkritisi teori konstruksi sosial ini, yaitu Littlejohn & Foss (2009) yang menganggap konsep teori konstruksi sosial ini perlu diperjelas bagaimana memahami makna konstruksi bagi para sarjana. Kemudian Bungin (2011) menuturkan bahwa teori konstruksi memiliki kelemahan karena memerlukan waktu yang lama untuk menkonstruksi sosial dan realitas kenyataan yang ada. Sehingga Craib (dalam Andrewst, 2012) menganggap bahwa konstruksi sosial itu mendapatkan posisi sebagai penghibur realitas sosial. Dan mengungkapkan bahwa konstruksi sosial tidak lebih dari mekanisme dalam menghadapi perubahan yang cepat.

Berpijak dari argument di atas, pada dasarnya merujuk pada 3 bagian dari sebuah teori konstruksi sosial, yaitu mengidentifikasi kondisi dan perilaku tertentu. Kedua, mengidentifikasi berbagai definisi atau klaim yang dibuat tentang kondisi dan perilaku ini. ketiga, menyoroti definisi dan klaim relative dengan kondisi yang terkait. Sehingga, implikasi menurut Wolgar bahwa kondisi tidak akan berubah, melainkan definisi dan kondisi tersebut dapat dihasilkan dari keadaan sosial para definisi, bukan dari kondisi itu sendiri (Wolgar dan Pawluch (dalam Holstein, 2006)).

Konstruksi sosial warga yang dibangun merupakan cerminan dari realitas yang ada dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, hal ini Collins (2016) menyebut realitas sosial sebagai manusia yang membentuk imaji dunia sehingga dipandang sebagai construction of reality. Hidayat (dalam Noname, 2018) menjelaskan bahwa suatu realitas sosial dapat bersifat nisbi yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan dengan perilaku sosialnya. Sehingga hal ini menjadi sebuah perdebatan dimana McQuail (2010) dalam pembahasannya mengenai media yaitu menganggap masyarakat merupakan konstruks dan bukan realitas yang pasti.

Namun pada akhirnya, teori konstruksi sosial ini merupakan teori yang sangat berpengaruh pada pemikiran atau tradisi yang ada dalam masyarakat. Karman (2015) mengemukakan pengaruh teori konstruksi sosial ini dengan memperhatikan dasar-dasar pengetahuan sebagai analisis fenomenologi, masyarakat sebagai kenyataan objektif yang lebih banyak membahas tentang sosiologi pengetahuan yang membantu dalam analisis fenomenologis, dan masyarakat sebagai kenyataan subjektif yang menerapkan kesadaran individu terhadap peristiwa sosial.

Membahas sebuah fenomenologi berarti sebuah fenomena yang dapat membangun konstruksi sosial didalamnya. Schneider (dalam Holstein, 2006) yang menyatakan bahwa ulasan tentang sudut pandang, konstruksi sosial telah mempengaruhi sisi empiris mereka yang peduli dengan fenomena sosial, mikropolitik, masalah sosial, persaingan kelompok yang mengarah kepada konstruksi sosial yang akan dibangun. Schutz (dalam Nindito, 2013) mengemukakan bahwa fenomena sendiri secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang baru terhadap focus dan kajian penelitian terhadap makna yang terbangun atas realitas kehidupan secara khusus dalam rangka pengembangan masalah-masalah ilmu sosial.

Jika sebuah penelitian mengenai teori konstruksi sosial menggunakan satu teori sama halnya melakukan penelitian yang semu, sehingga teori alternative yang akan dijadikan pijakan penelitian yaitu pemikiran dasar fenomenologis dari Schutz. Hal ini didasarkan pada ide yang menjadi pondasi dalam aliran pemikiran sosial yang menekankan pemikirannya pada proses pemahaman. Schutz (dalam Nindito, 2013) menyebutkan pemahaman yang dibangun atas realitas yang terjadi dilakukan atas dasar perilaku yang sadar. Lebih jauh Umanalio (2000) menafsirkan bahwa paradigma konstruksi dalam fenomena merupakan kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi atas peristiwa atau masalah sosial yang terjadi.

Fenomena Corona Virus Disease 2019 atau biasa kita sebut Covid-19 saat ini telah melanda negara Indonesia, dengan tranmisi virus yang cepat meluas. Hal ini manusia mendapatkan ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan. Tidak hanya itu, virus ini dapat mempengaruhi juga pada aspek sosial, ekonomi, hingga politik pemerintahan. Berbagai negara pada belahan dunia telah melakukan

kebijakan pembatasan berskala besar termasuk Indonesia, oleh karena itu banyak agenda internasional dan nasional yang ikut mendapatkan dampaknya untuk menundanya agendanya termasuk pemilihan umum. Indonesia pernah mengalami penundaan agenda tersebut saat Aceh mengalami bencana alam, dalam hal ini Kennedy (2020, hlm. 190) mengusulkan pada pembahasan alternative pola pengisi jawaban kepala daerah di masa pandemic, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tunda.

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan umum sebagai mekanisme yang membebaskan warga dari cengkraman kekuasaan yang tidak dihindari (Suryadi. 2017, hlm. 167). Di Indonesia pemilu kepada daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 desember 2020. Ini adalah pertama kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di masa pandemic covid-19 yang hampir 10 bulan menjadi bencana nasional. Hal ini telah mengakibatkan krisis tata kelola kebijakan yang menangani pandemic ini yang perlu melakukan upaya pencegahan dengan dibentuknya sebuah aturan atau regulasi.

Pandemic covid-19 memaksa kita semua untuk membuat kebiasaan baru atau normal baru dalam tingkah laku dan berbagai aturan lainnya. Namun pada akhirnya demokrasi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat dikatakan lebih penting, karena rasanya tidak lazim jika kesehatan masyarakat dikorbankan atas nama demokrasi. Hal ini Aswandi dan Rosiah (2019) menuturkan hak masyarakat saat ini yang dibutuhkan adalah jaminan kesehatannya dalam pemenuhan demokratisasi yang harus dijalankan.

Indonesia merupakan 1 dari 55 negara yang menunda agenda nasional yakni pemilihan kepala daerah. Hal ini yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Indonesia memutuskan memundanya sampai tanggal 9 Desember 2020. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Penelitian mengenai bagaimana teori kontruksi sosial menggambarkan warga negara memaknai pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini perlu setidaknya karena beberapa hal. Pertama, warga negara dalam konteks demokrasi pada hakikatnya merupakan pemegang kedaulatan termasuk dalam menentukan arah kehidupan bangsa dan negara ini. Kewarganegaraan pada dasarnya tidak dilihat dari statusnya saja, lebih dari itu kewarganegaraan merupakan seorangkat hak yang dimiliki masyarakat untuk di manifestasikan ke dalam bentuk praktik-praktik kewarganegaraan di bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Sehingga hal ini menjadi penentu warga negara sebagai masyarakat modern (modern citizenship).

Kedua, konstruksi sosial yang dimaksud merupakan bentuk partisipasi yang harus perlu di bangun. Hal ini sangat penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di tahun 2020 ini, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, namun dengan adanya pandemic saat ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadwalkan ulang pemilihan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Demikian keputusan tersebut tentunya melihat situasi kondisi masyarakat yang menyikapi jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditengah pandemic akan mengakibatkan bertambahnya kasus covid-19 di Indonesia.

Ketiga, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud mekanisme demokrasi secara langsung. Penyelenggaraan pilkada serentak dirancang untuk mewujudkan jalannya proses pemilihan secara efektif dan efisien, menurut Suryadi (2017, hlm. 167) Pilkada dilakukan sebagai mekanisme yang membebaskan warga dari cengkraman kekuasaan yang tidak dihindari. Oleh karena itu, Lussier (2016) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan untuk membatasi para elite politik dalam menyalahgunakan norma dan makna demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Disamping itu, tidak hanya masyarakat saja yang turut mengkonstruksi pemikirannya terhadap

pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemic ini, kalangan professional pun turut mengkontruksi mengenai realitas sosial sehingga mengharapkan adanya kebijakan yang efektif dalam melaksanakan pilkada serentak ini.

Fenomena pemilihan umum dan lokal bukan saja dialami bangsa Indonesia, melainkan terjadi pula di berbagai negara. Masyarakat tentunya meletakkan harapan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah pandemic ini. Harapan ini juga harus di perhatikan kepada calon kandidat yang nanti akan menduduki posisi tertinggi di setiap daerahnya. Makna dari pemilihan kepala daerah sendiri sebenarnya merupakan bagaimana menciotakan sosok pemimpin yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat tentunya mengharapkan menciptakan kesejahteraan dan memulihkan kembali perekonomian rakyat dari adanya pandemic ini merupakan prioritas utama dari adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini (Rizki, 2020).

Berangkat dari penjelasan di atas, maka keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari adanya peran masyarakat dan juga pemerintah dengan hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah. Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi, proses demokratisasi di Indonesia menjadi sangat penting dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada. Di era teknologi saat ini, dapat menjadi peluang untuk memberikan kebebasan masyarakat dalam memberikan masukan akan kebijakan pemerintahan melalui media sosial. Tentunya hal ini pula dijadikan kesempatan para calon kandidat yang dapat berkampanye melalui media sosial.

Karenanya, keberadaan media memiliki posisi yang sangat strategis untuk memfasilitasi partisipasi warga negara dalam menyampaikan gagasannya sebagai bentuk pembangunan demokrasi di Indonesia. Merujuk pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020, terkait pelaksanaan kampanye pun dapat dilakukan di berbagai media termasuk media sosial yang saat ini menjadi ruang public bagi masyarakat. Dengan begitu melalui jejaring sosial, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menghidupkan demokrasi di Indonesia.

Namun, keberfungsian media sebagai saran ruang public adalah hal biasa jika terjadi pro dan kontra, maka hal ini menunjukkan realitas sosial yang dapat ditemukan dalam dimensi kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok yang saling berinteraksi (Parera, 2013). Oleh karena itu media sosial sebagai saran konstruksi sosial masyarakat dalam menentukan pemikirannya dalam memaknai fenomena yang ada, yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Oleh karena itu setidaknya ada 2 hal yang penting bagaimana merangkai digital politik bagi warga negara Indonesia. Pertama, penguasaan domain internet yang lebih baik menjadi kontrol bagi negara untuk mengawasi, dan masyarakat untuk mengaksesnya. Kedua, intensitas penggunaan internet khususnya media sosial dapat dimaknai sebagai aktivitas leisure atau pleasure. Hal ini, perlu dirumuskan adanya parameter yang tepat untuk menduduki posisi media sosial di dalam masyarakat, yaitu apakah internet sebagai media sosial menjadi ruang diskursus untuk keterlibatan seorang warga negara.

Media menjadi wahana gagasan diantara warga negara dapat menghasilkan sebuah konsesus dan kesepakatan kelompok sebagai hasil transformasi gagasan individu yang disatukan. Oleh karena itu, media sebagai sarana diskusi politik di kalangan masyarakat, dapat dimaknai sebagai proses demokrasi dimana hal ini dapat dilihat setiap individu mendapatkan kedudukan yang sama pada praktek kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Teori konstruksi sosial merupakan teori yang memandang manusia sebagai pencipta realitas sosial, dimana hal ini manusia memiliki kemampuan untuk muncul dan nampak dalam kehidupan sebagai hasil dari konstruksi sosial. Sebuah novelty kebaruan dari teori konstruksi sosial yang

digunakan sebagai Grand Theory dalam rancangan penelitian yang akan dilakukan yaitu melihat fenomena sosial politik yang terjadi saat ini sebagai sarana konstruksi sosial, dan lebih dari itu penelitian ini akan mengkaji beberapa kemungkinan dari proses dialektis antara pelaku politik, pemangku kebijakan, serta masyarakat sebagai subjek yang dapat membangun konstruksi sosial atas realitas yang terjadi.

Sebuah perdebatan teori konstruksi sosial, pada akhirnya menimbulkan asumsi baru bahwa perspektif, sudut pandang, paradigma yang membangun konstruksi sosial adalah aspek yang mencakup dunia sosial secara objektif dan nyata dimana hal ini dapat membangun konstruksi sosial berdasarkan masalah sosial. Manusia dalam berinteraksi selalu menggunakan symbol-simbol yang disampaikan Berger dan Luckmann dengan istilah eksternalisasi kemudian akan menjadi perantara manusia dalam berinteraksi sehingga memiliki keberadaan dan memiliki makna dari pencipta aslinya.

Bagaimana warga negara memaknai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemic merupakan sebuah realitas dimana warga negara menyampaikan pendapat untuk jaminan atas kesehatan dan keselamatan dalam memenuhi hak nya. Kebebasan tersebut dimana posisi media dapat dijadikan sebagai ruang demokrasi warga negara dalam menghasilkan sebuah konsensus dari setiap gagasan individu yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Maka keberhasilan sebuah negara demokrasi tidak terlepas dari adanya peran warga negara dan juga pemerintah dengan hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah. Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi, proses demokratisasi di Indonesia menjadi sangat penting dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, T. (2012). What is social constructionism? Grounded theory review, 11(1).
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Carey, J. (2002). A cultural approach to communication. McQuail's reader in mass communication theory, 36-45.
- Craig, Robert T. (1999). Communication Theory as a field, *Communication Theory*, Vol. 9, 119-61
- Delia, JG. (1987). Communication Research: A History dalam *Handbook of Communication Science*, eds. Berber R. Charles dan Steven H. Chaffee. Newbury, CA: Sage Publications Inc.
- Holstein, J. A., & Miller, G. (Eds.). (2006). Reconciling social constructionism: Debates in social problems theory. Transaction publishers.
- Karman. (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)*. Jakarta.
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- L Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*.
- Littlejohn, SW., Foss, KA. (2002). *Theories of Human Communication*, fifth edition. Belmont, California: Thomson Wadsworth.
- Lussier, D. N. (2016). *Constraining Elites in Rusia and Indonesia (political participation and regime survival)*. New York: Cambridge University Press. doi: <https://doi.org/10.1017/slr.2020.104>

- Mato, D. (1996). On the theory, epistemology, and politics of the social construction of “cultural identities” in the age of globalization: Introductory remarks to ongoing debates. *Identities*, 3(1-2), 61–72.
- McQuail, Denis. (2010). *McQuail’s Mass Communication Theory*, 6th edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2(1). 79-94
- Noname, N. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 12(2), 1-25
- Umanailo, M. C. B. (2019). Paradigma Konstruktivis. 75
- Perera. (2013). *Pengantar dalam buku Berger, PL & Luckmann, T. Tafsir Sosial Atas Realitas: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES
- Pfohl, S. (2008). The reality of social constructions. *James Holstein and Jay Gubrium, Handbook of Constructionist Research*, 645-668
- Plucker, J. A., & Renzulli, J. S. (1999). Psychometric approaches to the study of human creativity. *Handbook of creativity*, 35-61.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 4(2), 143-155.
- Suryadi, K. (2017). *Menak Senayan: arsitek komunikasi politik Indonesia*. Pustaka Jaya.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia